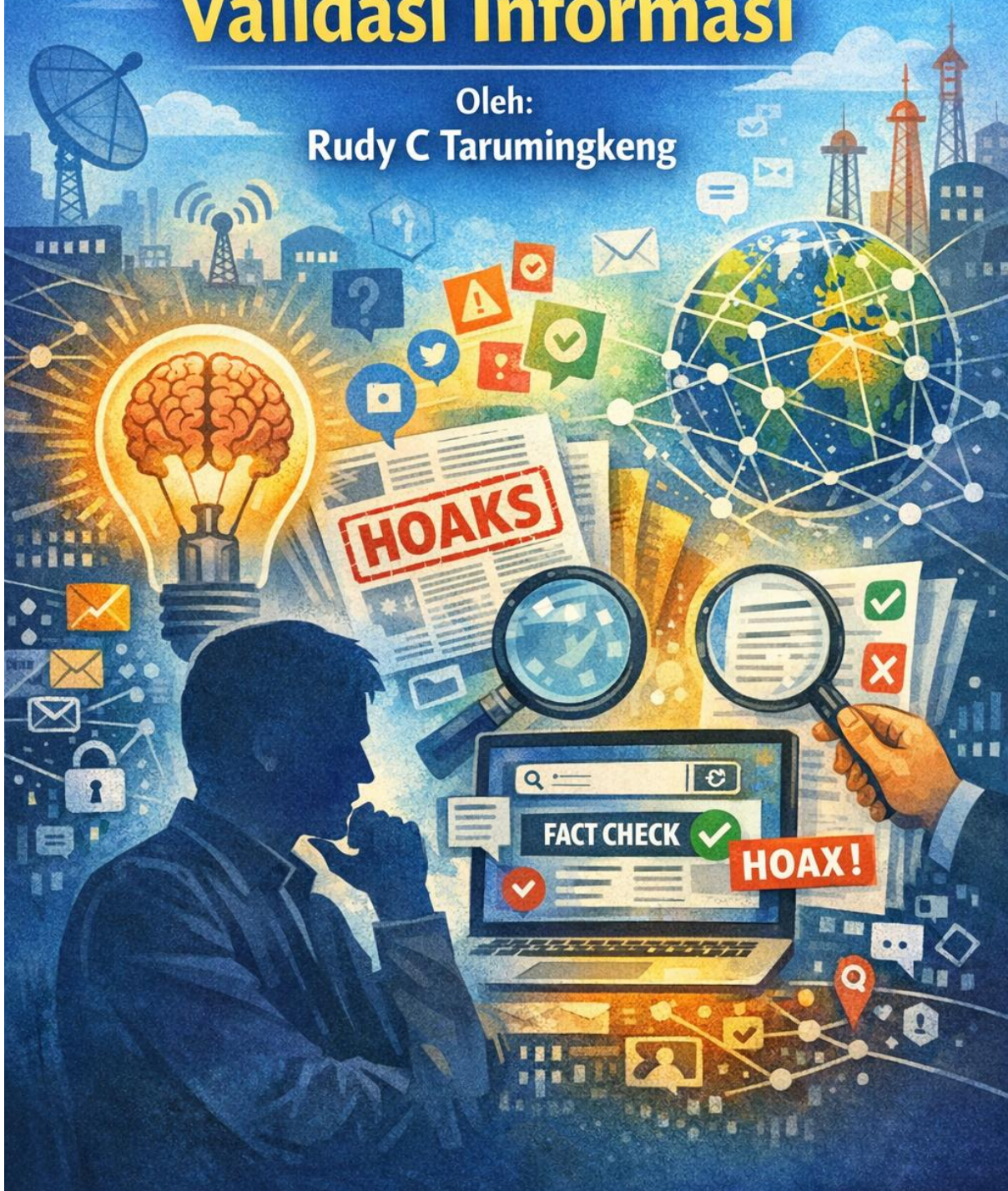


Critical Thinking, Hoaks, dan Validasi Informasi

Oleh:
Rudy C Tarumingkeng



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

17 March 2026

CRITICAL THINKING, HOAKS, DAN VALIDASI INFORMASI

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara *critical thinking*, hoaks, dan validasi informasi dalam konteks masyarakat digital yang ditandai oleh arus informasi yang sangat cepat, melimpah, dan sering kali tidak tersaring. Tujuan utama pembahasan ini adalah menjelaskan pentingnya berpikir kritis sebagai kompetensi intelektual dan sosial untuk menghadapi penyebaran informasi palsu, menyesatkan, atau dipelintir di berbagai platform digital. Kajian ini menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya muncul karena niat manipulatif sebagian pihak, tetapi juga diperkuat oleh faktor psikologis seperti *confirmation bias*, emosi, otoritas semu, kecepatan distribusi media sosial, dan rendahnya kebiasaan verifikasi di kalangan pengguna. Dalam kerangka tersebut, berpikir kritis dipahami sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, membedakan fakta dari opini, menilai kredibilitas sumber, memeriksa bukti, memahami konteks, dan menarik kesimpulan secara proporsional. Makalah ini juga menekankan bahwa validasi informasi merupakan praktik penting yang mencakup pemeriksaan sumber, pembacaan lateral (*lateral reading*), triangulasi informasi, pengecekan tanggal, konteks visual, serta penggunaan lembaga pemeriksa fakta. Lebih jauh, pembahasan ini menegaskan bahwa pendidikan, keluarga, institusi media, platform digital, dan negara memiliki peran strategis dalam membangun budaya verifikasi. Simpulan utama makalah ini adalah bahwa kemampuan berpikir kritis dan validasi informasi bukan lagi sekadar kecakapan akademik, melainkan fondasi ketahanan sosial, kualitas demokrasi, dan kematangan warga dalam menghadapi tantangan era digital.

Bila Bapak ingin, saya dapat langsung lanjutkan dengan **kata kunci** yang sesuai untuk abstrak ini.

1. Pendahuluan

Kita hidup pada zaman ketika informasi datang bukan lagi seperti aliran sungai yang dapat diikuti dengan tenang, melainkan seperti hujan deras yang turun dari segala arah. Berita muncul di layar ponsel sejak pagi, komentar berkejaran di media sosial, potongan video beredar tanpa konteks, dan judul-judul sensasional sering kali mendahului pemahaman yang matang. Dalam situasi seperti itu, manusia modern menghadapi paradoks besar: akses terhadap pengetahuan semakin luas, tetapi kepastian tentang kebenaran justru semakin sulit diraih. UNESCO menempatkan media and information literacy sebagai kemampuan penting agar masyarakat dapat terlibat secara kritis dengan informasi, menavigasi lingkungan digital secara aman, dan membantu membangun kepercayaan dalam ekosistem informasi. WHO juga menegaskan bahwa "infodemic" adalah kelimpahan informasi—termasuk yang salah atau menyesatkan—yang menimbulkan kebingungan dan dapat merusak respons sosial terhadap persoalan publik. ([UNESCO](#))

Di sinilah topik *critical thinking, hoaks, dan validasi informasi* menjadi sangat penting. Ia bukan lagi sekadar tema akademik untuk ruang kelas filsafat, komunikasi, atau metodologi penelitian. Ia telah menjadi kompetensi hidup. Di rumah, seseorang menerima pesan berantai yang mengatasnamakan dokter terkenal. Di kampus, mahasiswa menemukan artikel viral yang tampak ilmiah tetapi ternyata hanya opini tanpa data. Di tempat kerja, seorang manajer membuat keputusan berdasarkan grafik yang sebenarnya dipotong dari konteks aslinya. Dalam politik, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, kualitas keputusan sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang dipakai. Karena itu, kemampuan berpikir kritis tidak boleh dipahami sebagai kemewahan intelektual, melainkan sebagai

kebutuhan kewargaan, kebutuhan profesional, bahkan kebutuhan moral. OECD menekankan bahwa literasi media dan informasi perlu menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat integritas informasi, termasuk pemahaman tentang cara kerja sistem rekomendasi algoritmik dan AI generatif. ([OECD](#))

Sering kali orang mengira berpikir kritis berarti gemar membantah, curiga kepada semua hal, atau selalu mengambil posisi oposisi. Pandangan itu keliru. Berpikir kritis bukanlah hobi untuk menyalahkan, melainkan disiplin untuk menilai. Britannica mendefinisikan *critical thinking* sebagai cara berpikir yang menggunakan penalaran deliberatif dan penelaahan informasi secara tidak memihak untuk sampai pada kemungkinan solusi atau penilaian yang lebih baik. Monash University menjelaskan bahwa berpikir kritis mencakup kegiatan bertanya, menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, dan membuat penilaian atas apa yang dibaca, didengar, diucapkan, atau ditulis. Dengan kata lain, *critical thinking* bukan budaya sinis; ia adalah budaya penilaian yang bertanggung jawab. ([Encyclopedia Britannica](#))

Dalam dunia digital, lawan utama dari *critical thinking* adalah kecenderungan menerima informasi secara spontan. Di media sosial, kecepatan sering lebih dihargai daripada ketepatan. Sesuatu dianggap benar karena sudah dibagikan ribuan kali, karena diucapkan dengan percaya diri, atau karena selaras dengan emosi dan keyakinan kelompok. Padahal UNESCO mengingatkan bahwa istilah “fake news” sering menyesatkan karena problem yang sesungguhnya lebih luas: ada *misinformation* yang salah tetapi dibagikan tanpa niat jahat, ada *disinformation* yang salah dan disebar dengan sengaja, dan ada pula *mal-information* yang menggunakan informasi benar tetapi dipelintir atau dipakai untuk mencelakakan pihak lain. Karena itu, masalah hoaks tidak cukup dijelaskan sebagai “berita bohong”; ia adalah persoalan epistemik, psikologis, sosial, dan politis sekaligus. ([UNESCO](#))

Esai ini berangkat dari tesis sederhana tetapi penting: dalam masyarakat digital, kualitas kehidupan publik sangat ditentukan oleh kualitas

kebiasaan berpikir warga. Masyarakat yang lemah dalam berpikir kritis akan mudah dikuasai oleh hoaks, propaganda, manipulasi visual, dan narasi emosional yang dangkal. Sebaliknya, masyarakat yang membangun budaya validasi informasi akan lebih tahan terhadap kepanikan, polarisasi, dan penyesatan. Karena itu, pembicaraan tentang critical thinking harus selalu dihubungkan dengan praktik validasi informasi yang nyata: memeriksa sumber, menilai bukti, membaca secara lateral, memahami konteks, memeriksa tanggal, membandingkan klaim, dan berani menunda kesimpulan. Digital Inquiry Group menekankan pentingnya *lateral reading*, yaitu meninggalkan laman yang sedang dibaca untuk memeriksa apa yang dikatakan sumber tepercaya lain tentang situs atau klaim tersebut. ([Civic Online Reasoning](#))

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini terasa sangat relevan. Upaya literasi digital dijalankan melalui berbagai inisiatif, termasuk fasilitas klarifikasi hoaks dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta gerakan nasional literasi digital Siberkreasi yang menggunakan kerangka empat pilar: kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital. Kehadiran program-program semacam ini menunjukkan bahwa masalah hoaks tidak dapat diselesaikan hanya dengan penindakan; ia memerlukan pembelajaran publik yang sistematis dan berkelanjutan. ([Kementerian Komunikasi dan Digital](#))

2. Hakikat Critical Thinking: Dari Reaksi ke Penilaian

Pada hakikatnya, critical thinking adalah upaya memindahkan manusia dari kehidupan yang digerakkan oleh reaksi menuju kehidupan yang dipandu oleh penilaian. Orang yang reaktif segera percaya, segera marah, segera membagikan, segera menuduh, segera memihak. Orang yang berpikir kritis melakukan hal sebaliknya: ia berhenti sejenak, memeriksa, membandingkan, lalu menyimpulkan. Dalam pengertian ini, critical thinking tidak hanya bekerja pada level logika, tetapi juga pada level karakter. Ia menuntut kerendahan hati intelektual, kesabaran, kemauan untuk direvisi, dan keberanian untuk berkata, "Saya belum cukup tahu." Foundation for Critical Thinking menekankan bahwa critical thinking

adalah pemikiran yang terarah-diri dan berdisiplin-diri, yang berupaya bernalar pada tingkat kualitas tertinggi secara adil dan rasional.

(criticalthinking.org)

Secara akademik, berpikir kritis mencakup beberapa unsur yang saling terkait. Pertama, kemampuan mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang sebenarnya. Banyak kesalahan penilaian terjadi bukan karena orang salah menjawab, tetapi karena sejak awal ia mengajukan pertanyaan yang salah. Kedua, kemampuan membedakan fakta, opini, interpretasi, dan spekulasi. Ketiga, kemampuan menilai mutu bukti: apakah sumbernya primer atau sekunder, apakah datanya lengkap, apakah metodenya jelas, apakah kesimpulannya sebanding dengan bukti yang tersedia. Keempat, kemampuan melihat alternatif penjelasan. Kelima, kemampuan menarik simpulan yang proporsional—tidak berlebihan, tidak prematur, dan tidak dogmatis. Monash University dan Britannica sama-sama menempatkan evaluasi, interpretasi, analisis, dan penilaian sebagai inti dari berpikir kritis.

(Monash University)

Dalam praktik keseharian, critical thinking dapat digambarkan melalui narasi sederhana. Bayangkan seorang mahasiswa menerima unggahan yang menyatakan bahwa “AI akan menghapus seluruh pekerjaan manusia dalam lima tahun.” Mahasiswa yang tidak terbiasa berpikir kritis mungkin langsung panik atau langsung menyebarkan pesan itu ke teman-temannya. Sebaliknya, mahasiswa yang berpikir kritis akan bertanya: siapa sumber klaim ini? Apakah ada data lintas sektor? Apakah semua pekerjaan dimaksud, atau hanya jenis pekerjaan tertentu? Apakah ada penelitian resmi, atau hanya komentar personal yang viral? Dari contoh kecil itu terlihat bahwa critical thinking bekerja bukan dengan cara mematikan rasa ingin tahu, tetapi justru dengan memurnikannya.

Lebih jauh, berpikir kritis menuntut keterampilan metakognitif, yaitu kemampuan berpikir tentang cara kita berpikir. Sering kali kita tidak tertipu oleh kualitas informasi, melainkan oleh rasa yakin dalam diri sendiri. Kita merasa “sudah tahu” padahal belum memeriksa. Kita merasa “ini pasti benar” hanya karena klaim itu cocok dengan preferensi politik,

keyakinan agama, atau pengalaman pribadi. Di sinilah metakognisi menjadi penting: ia menolong kita memeriksa kemungkinan bahwa kesalahan ada pada cara kita menilai, bukan hanya pada objek yang kita nilai. OECD menekankan pentingnya kemampuan menavigasi ambiguitas, melakukan triangulasi sudut pandang, dan memahami isyarat yang terkait dengan sumber informasi. ([OECD](#))

Critical thinking juga berbeda dari sekadar kecerdasan. Banyak orang cerdas, fasih, bahkan berpendidikan tinggi tetap dapat tertipu hoaks. Mengapa? Karena kecerdasan tanpa disiplin epistemik bisa berubah menjadi alat pembenaran diri. Orang cerdas dapat lebih lihai merasionalisasi keyakinan yang salah. Ia dapat menyusun argumen canggih untuk membela informasi palsu yang ia sukai. Karena itu, critical thinking bukan semata-mata kemampuan kognitif tinggi, tetapi kebiasaan untuk tunduk pada bukti. Dalam bahasa lain, berpikir kritis bukan seni memenangkan argumen, melainkan seni mengoreksi diri.

3. Hoaks: Bukan Sekadar Kebohongan, tetapi Gangguan pada Ekosistem Pengetahuan

Ketika orang mendengar kata "hoaks", mereka biasanya membayangkan berita palsu yang dibuat oleh pihak tak bertanggung jawab. Gambaran ini benar, tetapi belum lengkap. Hoaks adalah fenomena yang lebih kompleks karena berhubungan dengan cara informasi diproduksi, disebar, diterima, dan diberi makna dalam masyarakat. UNESCO mendorong penggunaan istilah yang lebih presisi daripada "fake news", karena fenomena ini melibatkan beragam bentuk konten salah dan menyesatkan. OECD juga menekankan bahwa perbedaan mendasar antara misinformation dan disinformation terletak pada niat di balik penyebarannya: disinformation bersifat sengaja menyesatkan, sedangkan misinformation dapat tersebar tanpa niat jahat. ([UNESCO](#))

Perbedaan ini penting. Misinformation sering beredar justru melalui orang-orang yang niatnya baik. Seorang ibu di grup keluarga membagikan pesan kesehatan karena ia ingin melindungi orang yang ia kasihi. Seorang mahasiswa membagikan video yang tampak meyakinkan

karena ia percaya sedang mengungkap “kebenaran tersembunyi.” Seorang pegawai membagikan rumor ekonomi karena ingin koleganya “siap siaga.” Dalam semua kasus itu, niat dapat bersifat positif, tetapi isi pesannya keliru. WHO menegaskan bahwa misinformation adalah informasi salah yang tidak dibuat untuk melukai, tetapi kemudian dapat menyebar luas karena orang merasa mereka sedang membantu orang lain. ([World Health Organization](#))

Sebaliknya, disinformation lebih dekat dengan manipulasi yang sadar. Ia bisa dirancang untuk memengaruhi opini publik, menjatuhkan lawan politik, menciptakan kepanikan pasar, merusak reputasi individu, atau meningkatkan klik dan pendapatan iklan. Dalam bentuk ini, hoaks bukan hanya persoalan kesalahan, tetapi persoalan kekuasaan. Ia dapat menjadi instrumen dominasi. Orang tidak sekadar dibohongi; mereka diarahkan untuk melihat dunia melalui lensa yang sengaja diputarbalikkan. Karena itu, hoaks memiliki dimensi etis dan politis yang serius.

Ada pula bentuk yang lebih halus, yakni informasi yang secara teknis benar tetapi dilepas dari konteks yang relevan. Sebuah foto lama dipakai seolah-olah baru terjadi. Kutipan ilmuwan diambil sebagian sehingga berubah makna. Data statistik disajikan tanpa penjelasan tentang periode, sampel, atau batasannya. Dalam kasus seperti ini, masalahnya bukan semata benar atau salah, melainkan benar-yang-diselewengkan. Itulah sebabnya validasi informasi tidak cukup berhenti pada pertanyaan “apakah ini palsu?” Kita juga harus bertanya, “apakah ini lengkap?”, “apakah konteksnya utuh?”, dan “apakah kesimpulan yang ditarik dari data ini sah?”

4. Mengapa Hoaks Mudah Dipercaya?

Untuk memahami hoaks, kita tidak cukup memeriksa kontennya; kita juga perlu memeriksa manusia yang menerimanya. Hoaks menjadi kuat bukan hanya karena pembuatnya cerdik, tetapi karena psikologi manusia memang memiliki titik-titik kerentanan tertentu. Salah satu yang paling terkenal adalah *confirmation bias*. APA Dictionary of Psychology mendefinisikannya sebagai kecenderungan mengumpulkan bukti yang

menegaskan harapan atau keyakinan yang telah ada sebelumnya, sambil mengabaikan atau tidak mencari bukti yang bertentangan. Dengan bias ini, kita cenderung lebih mudah mempercayai hal yang kita sukai daripada hal yang benar-benar teruji. ([APA Dictionary](#))

Bias ini menjelaskan mengapa dua orang dapat membaca informasi yang sama tetapi tiba pada kesimpulan berbeda. Orang pertama melihat sebuah video tentang kebijakan publik lalu berkata, "Nah, ini membuktikan bahwa saya benar sejak awal." Orang kedua, yang memiliki posisi berlawanan, juga berkata hal yang mirip dari sudut pandang berbeda. Keduanya merasa sedang mencari kebenaran, padahal sebenarnya mereka sedang mencari pembenaran. Dalam kondisi seperti ini, informasi tidak diperlakukan sebagai objek evaluasi, tetapi sebagai amunisi identitas.

Selain confirmation bias, emosi memainkan peran besar. Konten yang menimbulkan marah, takut, jijik, atau haru cenderung menyebar lebih cepat daripada konten yang tenang dan bernuansa. Inilah sebabnya hoaks sering dirancang dengan judul bombastis, ancaman mendadak, atau narasi konspiratif. Orang yang emosinya sudah terpicu cenderung kehilangan jeda reflektif. Ia tidak lagi bertanya "apakah ini benar?", melainkan "siapa yang harus segera saya beri tahu?" WHO menjelaskan bahwa infodemic dapat menimbulkan kebingungan dan mendorong perilaku berisiko; jadi, dampak emosional informasi salah bukan sekadar abstrak, melainkan dapat memengaruhi tindakan nyata. ([World Health Organization](#))

Faktor berikutnya adalah otoritas semu. Banyak hoaks tampil meyakinkan karena menggunakan simbol kewibawaan: logo lembaga, istilah medis, suara yang tegas, grafik berwarna, atau foto orang yang tampak profesional. Padahal penampilan otoritatif bukan jaminan validitas. Dalam dunia digital, kredibilitas mudah disimulasikan. Karena itu, keterampilan berpikir kritis harus mampu membedakan antara "terlihat meyakinkan" dan "terverifikasi." Digital Inquiry Group mengajarkan bahwa ketika menemukan sumber asing atau klaim yang tidak dikenal, pembaca yang

terampil tidak tinggal diam di halaman itu, tetapi segera memeriksa siapa pihak di baliknya dan bagaimana ia dinilai oleh sumber tepercaya lain.

[\(Civic Online Reasoning\)](#)

Struktur platform digital juga ikut memperbesar masalah. OECD menegaskan bahwa penguatan integritas informasi hari ini perlu memperhitungkan sistem rekomendasi algoritmik dan AI generatif. Artinya, hoaks tidak lagi beredar hanya dari manusia ke manusia secara linear, tetapi diperkuat oleh arsitektur distribusi yang memprioritaskan keterlibatan, perhatian, dan viralitas. Konten yang mengaduk emosi atau memicu interaksi sering mendapat insentif algoritmik lebih besar, meskipun kebenarannya lemah. Dalam situasi seperti ini, beban verifikasi tidak bisa sepenuhnya dilemparkan ke individu; ekosistem digital itu sendiri harus dipahami sebagai bagian dari masalah. [\(OECD\)](#)

Ada juga faktor kelelahan kognitif. Di tengah banjir informasi, manusia mencari jalan pintas. Kita membaca judul tanpa isi, menonton potongan video tanpa konteks, dan mengambil kesimpulan dari tangkapan layar tanpa memeriksa dokumen aslinya. Jalan pintas ini membuat otak merasa efisien, tetapi justru membuka pintu bagi manipulasi. Berpikir kritis, sebaliknya, memang menuntut energi. Ia menuntut kesediaan untuk melambat. Maka salah satu musuh utama kebenaran di era digital bukan hanya kebohongan, melainkan tergesa-gesa.

5. Dampak Hoaks terhadap Individu dan Masyarakat

Hoaks bukan masalah kecil yang dapat disapu ke pinggir dengan mengatakan, "Ah, itu hanya pesan berantai." Dampaknya dapat merembes ke berbagai lapisan kehidupan. Dalam bidang kesehatan, WHO berulang kali menekankan bahwa misinformation dan infodemic dapat menurunkan kepercayaan terhadap otoritas kesehatan, memperburuk perilaku kesehatan masyarakat, dan memanjangkan krisis karena orang bingung tentang tindakan yang seharusnya diambil. Ketika orang lebih percaya rumor daripada pedoman resmi, konsekuensinya dapat menyangkut keselamatan jiwa. [\(World Health Organization\)](#)

Dalam bidang politik, hoaks dapat merusak deliberasi demokratis. Warga negara seharusnya membuat pilihan politik berdasarkan informasi yang cukup, perdebatan rasional, dan akses yang adil terhadap fakta. Tetapi bila ruang publik dibanjiri klaim palsu, potongan video menyesatkan, dan narasi permusuhan yang direkayasa, proses demokrasi bergeser dari pertukaran argumentasi menuju pertarungan persepsi. Hoaks politik tidak selalu perlu membuat orang percaya sepenuhnya; kadang cukup membuat orang bingung, sinis, dan kehilangan kepercayaan pada semua pihak. Dalam kondisi itu, demokrasi melemah bukan hanya karena ada kebohongan, tetapi karena lenyapnya kemungkinan membedakan benar dan salah secara publik.

Dalam bidang ekonomi, hoaks dapat menciptakan kepanikan atau keputusan investasi yang buruk. Bayangkan seseorang menerima pesan bahwa sebuah bank akan kolaps, sebuah emiten akan dilarang, atau suatu aset kripto pasti "to the moon" karena informasi orang dalam. Tanpa verifikasi, rumor semacam itu dapat menggerakkan tindakan yang merugikan. Bagi pelaku UMKM, manajer, dan investor ritel, kemampuan memeriksa sumber dan validitas data menjadi bagian dari literasi keuangan. Jadi, critical thinking di sini bukan cuma alat akademik, melainkan juga proteksi terhadap kerugian material.

Pada level sosial-budaya, hoaks mengikis kepercayaan. Masyarakat yang terus-menerus dibanjiri informasi menyesatkan bisa menjadi masyarakat yang lelah percaya. Ini berbahaya, sebab peradaban modern membutuhkan tingkat kepercayaan tertentu terhadap institusi, keahlian, prosedur ilmiah, dan komunikasi publik. Jika semua hal dianggap sama—fakta, opini, rumor, dan propaganda—maka ruang bersama akan runtuh menjadi pasar klaim yang gaduh. Poynter melalui IFCN menekankan bahwa fact-checking yang nonpartisan, transparan, dan terbuka terhadap koreksi merupakan instrumen penting bagi akuntabilitas jurnalistik, justru karena ketidaktransparanan dan bias dapat semakin merusak kepercayaan publik. ([IFCN Code of Principles](#))

6. Validasi Informasi: Dari Skeptisisme Spontan ke Prosedur yang Terlatih

Berbicara tentang pentingnya berpikir kritis tidak cukup apabila tidak disertai dengan prosedur validasi yang operasional. Banyak orang setuju bahwa hoaks berbahaya, tetapi tidak tahu langkah praktis ketika berhadapan dengan sebuah klaim. Karena itu, validasi informasi harus diajarkan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai kebiasaan metodologis. Dalam konteks ini, saya mengusulkan memahami validasi informasi sebagai serangkaian disiplin: berhenti sejenak, memeriksa sumber, membaca secara lateral, menguji bukti, memeriksa konteks, membandingkan dengan sumber lain, memeriksa elemen visual, dan menyimpulkan secara proporsional.

a. Berhenti sebelum percaya dan sebelum membagikan

Langkah pertama tampak sederhana, tetapi sebenarnya paling sulit: berhenti. Banyak hoaks menang karena berhasil menyingkirkan jeda. Ia mendesak pembaca untuk segera bertindak: "Sebarkan sekarang!", "Jangan sampai keluarga Anda terlambat tahu!", "Media tidak akan memberitakan ini!", atau "Segera lakukan sebelum terlambat!" Kalimat-kalimat seperti itu dirancang untuk melumpuhkan proses penilaian. Karena itu, penundaan singkat adalah bentuk perlindungan epistemik. Dalam jeda itu, kita mengambil kembali kedaulatan penilaian dari tekanan emosional.

b. Periksa siapa yang berbicara

Sumber adalah pintu pertama validasi. Siapa penulis atau pembicara? Apa afiliasinya? Apakah ia memiliki kompetensi relevan? Apakah situsnya transparan tentang redaksi, metodologi, atau kontak? IFCN menjadikan nonpartisanship, transparansi sumber, transparansi metodologi, dan komitmen pada koreksi sebagai prinsip penting bagi organisasi fact-checking. Prinsip ini dapat diadaptasi menjadi pertanyaan pribadi ketika kita menilai sumber: apakah ia transparan? apakah ia menunjukkan bukti? apakah ia terbuka pada koreksi? ([IFCN Code of Principles](#))

Di sinilah banyak orang tertipu. Mereka melihat nama yang terdengar ilmiah atau lembaga yang tampak resmi, lalu menganggap klaimnya sah. Padahal legitimasi nama harus dibedakan dari legitimasi isi. Sebuah laman bisa memakai istilah “research”, “institute”, atau “center” tanpa memenuhi standar ilmiah apa pun. Karena itu, memeriksa sumber berarti memeriksa siapa yang berada di balik nama, bukan hanya terkesan oleh kemasannya.

c. Gunakan lateral reading

Salah satu strategi paling penting di era digital adalah *lateral reading*. Digital Inquiry Group menjelaskan bahwa lateral reading berarti keluar dari laman yang sedang dibaca, membuka tab baru, dan melihat apa yang dikatakan situs tepercaya lain tentang sumber atau klaim tersebut. Strategi ini sangat penting karena membaca “vertikal” semata—yakni hanya mendalami apa yang diklaim oleh sebuah laman tentang dirinya sendiri—sering membuat kita terjebak pada penampilan yang telah dirancang untuk meyakinkan. ([Civic Online Reasoning](#))

Misalnya, jika Anda membaca artikel yang mengklaim adanya temuan ilmiah revolusioner, jangan hanya membaca halaman itu. Cari apakah universitas, jurnal, media arus utama yang kredibel, atau lembaga riset lain menyebut temuan yang sama. Jika sebuah organisasi mengaku independen, periksa apakah pihak luar juga mengenalnya demikian. Lateral reading memindahkan kita dari sikap pasif menjadi aktif. Kita tidak membiarkan sumber menjadi hakim atas dirinya sendiri.

d. Tanyakan: apa buktinya?

Setelah sumber diperiksa, pertanyaan berikutnya adalah bukti. Apakah klaim didukung data? Jika ya, data itu berasal dari mana? Apakah berupa penelitian primer, ringkasan media, pengalaman tunggal, atau hanya testimoni? Apakah ada tautan ke laporan asli? Apakah metodologinya jelas? Banyak hoaks bertahan karena meminjam bahasa bukti tanpa menyediakan bukti yang sesungguhnya. Kata-kata seperti “menurut penelitian”, “terbukti”, “studi menunjukkan”, atau “pakar mengatakan”

sering dipakai sebagai kosmetik epistemik. Critical thinking menuntut kita tidak puas dengan kosmetik. Kita harus melihat substansinya.

Dalam dunia akademik, mutu bukti penting karena kualitas simpulan bergantung padanya. Sebuah pengalaman pribadi mungkin bernilai sebagai ilustrasi, tetapi tidak cukup untuk generalisasi. Sebuah grafik mungkin tampak ilmiah, tetapi tanpa sumber dan konteks, ia hanya dekorasi statistik. Karena itu, validasi informasi harus selalu menyelidiki hubungan antara klaim dan bukti: apakah kesimpulan yang ditarik benar-benar didukung oleh data yang tersedia?

e. Periksa konteks, tanggal, dan kelengkapan

Informasi yang benar dapat menjadi menyesatkan ketika konteksnya dicabut. Foto bencana lama bisa muncul kembali dan dianggap peristiwa baru. Kutipan pejabat dapat diedit sehingga kehilangan kalimat yang mengubah makna. Potongan video 15 detik dapat membuat seseorang tampak mengatakan hal yang sesungguhnya diperdebatkannya secara kritis pada menit berikutnya. Karena itu, validasi informasi harus meliputi pertanyaan tentang waktu, tempat, situasi, dan kelengkapan materi.

Dalam praktiknya, periksa tanggal publikasi, tanggal kejadian, serta apakah materi visual pernah muncul sebelumnya. Google menyediakan alat pencarian fakta dan kemampuan pencarian berbasis gambar melalui Google Lens atau pencarian dengan URL gambar. Ini membantu menelusuri apakah sebuah foto atau klaim pernah diperiksa sebelumnya atau pernah dipakai dalam konteks lain. (toolbox.google.com)

f. Bandingkan dengan sumber independen lain

Satu sumber hampir tidak pernah cukup untuk klaim yang penting. Itulah sebabnya triangulasi diperlukan. Jika sebuah klaim benar-benar signifikan, biasanya ada jejaknya di lebih dari satu sumber independen. Bukan berarti semua sumber harus sepakat mutlak, tetapi harus ada pola verifikasi silang yang masuk akal. OECD menekankan pentingnya kemampuan melakukan triangulasi sudut pandang ketika menghadapi lingkungan informasi yang ambigu. ([OECD](https://www.oecd.org/))

Triangulasi juga menolong kita melihat perbedaan antara konsensus dan kebisingan. Dalam isu kesehatan, misalnya, pendapat seorang influencer tidak dapat disejajarkan begitu saja dengan panduan lembaga kesehatan yang berbasis telaah bukti. Dalam isu ilmiah, blog pribadi tidak setara dengan publikasi jurnal atau institusi riset yang kredibel. Dalam isu hukum, potongan komentar media sosial tidak setara dengan dokumen regulasi resmi. Berpikir kritis berarti memberi bobot yang layak pada jenis sumber yang berbeda.

g. Bedakan antara klaim, interpretasi, dan opini

Banyak kebingungan terjadi karena orang mencampur tiga hal ini. Klaim adalah pernyataan yang dapat diperiksa benar-salahnya. Interpretasi adalah cara menjelaskan makna dari fakta atau data. Opini adalah penilaian atau posisi normatif seseorang. Ketiganya sah dalam ruang publik, tetapi tidak boleh diperlakukan sama. Masalah muncul ketika opini disamakan sebagai klaim faktual, atau ketika interpretasi tunggal diperlakukan seolah-olah fakta yang tak terbantahkan.

Contohnya, kalimat "harga pangan naik 8 persen" adalah klaim yang dapat diverifikasi. Kalimat "kenaikan ini membuktikan pemerintah gagal total" adalah interpretasi dan penilaian politik. Sementara kalimat "saya tidak percaya kebijakan ini akan efektif" adalah opini. Ketika masyarakat gagal membedakan ketiganya, debat publik berubah menjadi kekacauan semantik.

h. Nilai bahasa dan retorika yang digunakan

Hoaks sering dapat dikenali dari gaya bahasanya. Ia gemar memakai kata-kata absolut seperti "pasti", "semua", "tidak ada media yang berani membongkar", atau "inilah satu-satunya fakta yang disembunyikan." Ia juga kerap mengandalkan seruan moral dan rasa urgensi ekstrem. Namun gaya bahasa saja tidak cukup untuk memvonis suatu klaim palsu. Ada informasi benar yang juga ditulis dengan nada kuat. Karena itu, bahasa harus diperlakukan sebagai indikator awal, bukan putusan akhir. Ia

mengundang pemeriksaan lebih lanjut, bukan menggantikan pemeriksaan.

i. Gunakan lembaga fact-checking, tetapi jangan berhenti di sana

Memfaatkan lembaga fact-checking adalah langkah penting. Google Fact Check Tools memungkinkan pencarian atas klaim yang telah diperiksa. Organisasi yang mengikuti Code of Principles IFCN berkomitmen pada standar nonpartisan, transparansi, dan koreksi. Namun berpikir kritis tetap menuntut partisipasi aktif dari pengguna. Fact-checking bukan jasa yang membebaskan warga dari tanggung jawab berpikir; ia adalah mitra untuk memperkuat budaya verifikasi.

(toolbox.google.com)

7. Studi Naratif: Bagaimana Hoaks Bekerja dalam Kehidupan Sehari-hari

Agar pembahasan ini tidak berhenti pada teori, bayangkan tiga adegan berikut.

Adegan pertama terjadi di grup keluarga. Seseorang membagikan pesan bahwa minuman tertentu “terbukti membersihkan semua racun dari tubuh dalam dua jam” dan “sudah diakui dokter luar negeri.” Grup menjadi ramai; beberapa anggota langsung berterima kasih, yang lain segera meneruskan ke grup lain. Dalam situasi seperti ini, hoaks bekerja melalui dua jalur: kepercayaan antaranggota dan rasa peduli. Pesan itu dipercaya bukan karena buktinya kuat, tetapi karena datang dari lingkaran yang dianggap aman. Critical thinking meminta anggota grup bertanya: dokter mana, lembaga mana, mana sumber penelitian aslinya, dan apakah ada peringatan dari otoritas kesehatan? Tanpa langkah itu, niat baik berubah menjadi saluran penyebaran informasi salah.

Adegan kedua terjadi di kampus. Seorang mahasiswa menulis makalah dengan mengutip artikel viral tentang “hasil riset terbaru” yang menyatakan generasi tertentu tidak lagi perlu belajar menulis karena AI akan menggantikan semuanya. Artikel itu tampak meyakinkan, memakai grafik dan istilah akademik. Namun setelah ditelusuri secara lateral,

ternyata situs tersebut bukan jurnal, penulisnya tidak jelas, dan grafiknya diambil dari presentasi bisnis yang tidak pernah melalui proses telaah akademik. Di sini pelajaran utamanya jelas: tampilan ilmiah bukan jaminan validitas ilmiah.

Adegan ketiga terjadi di dunia kerja. Seorang manajer menerima tangkapan layar yang mengklaim pesaing utamanya akan tutup akibat investigasi besar. Tanpa verifikasi, ia menyampaikan rumor itu kepada tim dan mengubah strategi secara tergesa-gesa. Beberapa hari kemudian, rumor itu terbukti palsu. Kerusakan yang terjadi bukan hanya salah informasi, tetapi salah keputusan. Ini menunjukkan bahwa validasi informasi adalah bagian dari tata kelola organisasi yang sehat.

8. Pendidikan sebagai Garis Pertahanan Pertama

Jika hoaks adalah epidemi sosial, maka pendidikan adalah vaksin kebudayaan. UNESCO berulang kali menempatkan media and information literacy sebagai garis pertahanan penting terhadap disinformasi. Ini berarti sekolah, kampus, keluarga, komunitas, dan organisasi harus mengajarkan bukan hanya cara mengakses informasi, tetapi cara menilai informasi. Unit pembelajaran UNESCO untuk guru secara eksplisit menekankan kompetensi melakukan fact-checking dan menerjemahkan literasi informasi menjadi indikator pengetahuan, sikap, dan keterampilan. ([UNESCO](#))

Masalahnya, banyak sistem pendidikan masih terlalu menekankan hafalan daripada evaluasi. Siswa diajar mencari jawaban benar, tetapi kurang dilatih memeriksa bagaimana suatu jawaban dibentuk. Mahasiswa diminta mengutip banyak sumber, tetapi tidak selalu diajar cara membedakan sumber yang sahih dan yang lemah. Padahal dalam lingkungan digital, kompetensi akademik harus melampaui akumulasi referensi; ia harus mencakup penilaian mutu referensi.

Temuan OECD cukup mengkhawatirkan. Dalam PISA 2018, ketika siswa dihadapkan pada tugas literasi yang menuntut pemahaman terhadap isyarat implisit terkait isi atau sumber informasi, rata-rata hanya 9 persen

siswa di negara OECD yang mampu membedakan fakta dan opini berdasarkan isyarat implisit. OECD juga menerbitkan kajian khusus tentang kesiapan remaja menghadapi fake news dan misinformation, menandakan bahwa persoalan ini sudah menjadi agenda pendidikan global. ([OECD](#))

Karena itu, pembelajaran critical thinking semestinya bersifat lintas mata pelajaran. Dalam pelajaran bahasa, siswa dapat diajak membedakan opini, argumentasi, dan manipulasi retorik. Dalam sains, mereka belajar membedakan hipotesis, bukti, dan generalisasi berlebihan. Dalam sejarah, mereka diajar menilai sumber primer dan sekunder. Dalam ekonomi, mereka belajar menafsirkan data dan memeriksa klaim pasar. Dalam pendidikan kewarganegaraan, mereka belajar menimbang informasi publik dan propaganda. Dengan demikian, berpikir kritis bukan modul tambahan, melainkan jiwa dari pendidikan modern.

9. Validasi Informasi dalam Era AI dan Konten Sintetis

Topik ini semakin mendesak karena kita memasuki zaman ketika tidak semua yang terlihat nyata sungguh nyata. Konten sintetis, AI generatif, dan manipulasi multimedia membuat validasi informasi menjadi lebih kompleks. OECD secara eksplisit menyebut bahwa penguatan media, information, and digital literacy kini perlu mencakup pemahaman terhadap cara kerja AI generatif dan sistem rekomendasi. Ini berarti keterampilan lama seperti memeriksa teks kini harus diperluas dengan literasi visual, audio, dan metadata. ([OECD](#))

Dalam era ini, pertanyaan "apakah ini pernah ditulis?" tidak lagi cukup. Kita juga harus bertanya, "apakah gambar ini asli?", "apakah suara ini dimanipulasi?", "apakah video ini dipotong?", dan "apakah ada sumber primer yang dapat mengonfirmasi kejadian ini?" Google Lens dan pencarian berbasis gambar membantu pada level tertentu, tetapi alat teknis hanyalah bagian dari solusi. Yang lebih penting adalah mentalitas verifikasi: tidak silau oleh kualitas produksi, tidak mudah percaya karena kemasan realistis, dan selalu mencari bukti lintas sumber. ([Google Help](#))

AI juga menghadirkan tantangan lain: kelancaran bahasa dapat menciptakan ilusi kebenaran. Teks yang tersusun rapi, meyakinkan, dan tampak “ilmiah” belum tentu akurat. Ini menjadi pelajaran penting bagi dosen, mahasiswa, peneliti, jurnalis, dan publik luas. Di masa lalu, salah satu tanda informasi meragukan mungkin adalah tata bahasa yang buruk. Sekarang justru informasi salah bisa hadir dalam bentuk yang sangat rapi. Maka fokus validasi harus bergeser dari permukaan bahasa menuju mutu bukti dan keterlacakan sumber.

10. Membangun Budaya Verifikasi: Tugas Individu, Keluarga, Institusi, dan Negara

Melawan hoaks tidak cukup dilakukan secara individual. Diperlukan budaya verifikasi yang dibangun bersama. Pada level individu, ini berarti membentuk disiplin pribadi: jangan membagikan sebelum memeriksa, jangan mengutip sebelum membaca, jangan percaya hanya karena setuju. Pada level keluarga, ini berarti membangun etika komunikasi digital: grup keluarga bukan tempat memperbanyak rumor, tetapi ruang saling menjaga mutu informasi. Pada level sekolah dan kampus, ini berarti merancang pembelajaran yang mengasah evaluasi sumber, bukan hanya reproduksi materi.

Pada level institusi media dan fact-checking, transparansi menjadi kunci. IFCN menekankan komitmen pada fairness, transparansi sumber, transparansi pendanaan dan organisasi, transparansi metodologi, serta komitmen terhadap koreksi yang jujur. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak lahir dari klaim “percayalah kepada kami”, melainkan dari proses yang bisa diperiksa. ([IFCN Code of Principles](#))

Pada level negara, penanganan hoaks harus menjaga keseimbangan antara perlindungan publik dan kebebasan berekspresi. Intervensi yang terlalu lemah membuat ruang digital dikuasai manipulasi, tetapi intervensi yang terlalu keras berisiko berubah menjadi pembungkaman. Karena itu, literasi digital perlu berjalan berdampingan dengan tata kelola yang akuntabel, mekanisme klarifikasi resmi, dan kerja sama multipihak. Upaya

Komdigi dan Siberkreasi menunjukkan arah bahwa literasi digital harus diposisikan sebagai gerakan sosial, bukan sekadar program birokratis.

([Kementerian Komunikasi dan Digital](#))

Pada level platform teknologi, tanggung jawab tidak boleh dihindari. Jika arsitektur platform memberi insentif pada virality tanpa cukup perlindungan terhadap kualitas informasi, maka platform ikut membentuk masalah. OECD menekankan bahwa penguatan integritas informasi perlu memerhatikan bagaimana sistem digital bekerja. Artinya, pembahasan hoaks tidak bisa hanya menasihati pengguna agar “lebih bijak”; ia juga harus menyentuh desain sistem, moderasi konten, dan akuntabilitas distribusi informasi. ([OECD](#))

11. Dari Literasi ke Kebijakan

Pada akhirnya, persoalan critical thinking, hoaks, dan validasi informasi tidak hanya berbicara tentang teknik, tetapi tentang watak peradaban. Sebuah masyarakat dapat memiliki akses internet cepat, ribuan kanal informasi, dan teknologi AI tercanggih, tetapi tetap rapuh bila warganya tidak terbiasa menilai informasi dengan jernih. Sebaliknya, masyarakat yang melatih warganya untuk bertanya, memeriksa, membandingkan, dan menunda penilaian akan lebih tahan terhadap manipulasi. Dalam pengertian ini, validasi informasi adalah bentuk etika publik. Ia menjaga agar ruang bersama tidak jatuh menjadi arena kebisingan.

Critical thinking harus dipahami sebagai kebajikan intelektual. Ia melibatkan kerendahan hati untuk mengakui ketidaktahuan, keberanian untuk merevisi keyakinan, dan ketekunan untuk mencari bukti yang lebih baik. Ia juga menuntut keadilan dalam berpikir: jangan hanya keras terhadap informasi yang kita benci, tetapi juga kritis terhadap informasi yang kita sukai. Confirmation bias mengingatkan bahwa ancaman terbesar terhadap kebenaran sering datang dari kenyamanan psikologis kita sendiri. ([APA Dictionary](#))

Hoaks, pada sisi lain, mengajarkan bahwa kebohongan modern jarang berdiri sendiri. Ia menumpang pada emosi, identitas, kecepatan, desain

platform, dan kelelahan kognitif. Karena itu, solusi terhadap hoaks juga harus berlapis: pendidikan, keterampilan verifikasi, fact-checking yang transparan, desain platform yang lebih bertanggung jawab, dan budaya publik yang menghargai bukti. UNESCO, WHO, OECD, serta jejaring fact-checking internasional dan nasional pada dasarnya bergerak ke arah yang sama: memperkuat ketahanan masyarakat terhadap informasi salah melalui literasi, transparansi, dan pembelajaran publik. ([UNESCO](#))

Maka, pertanyaan yang paling penting bukan lagi “apakah hoaks akan hilang?” Kemungkinan besar tidak. Setiap zaman memiliki bentuk penyesatannya sendiri. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kita sedang membangun manusia yang cukup matang untuk tidak mudah dikuasai oleh penyesatan itu? Jika jawabannya ya, maka critical thinking bukan sekadar kompetensi akademik, melainkan fondasi kebebasan batin. Ia membuat manusia tidak hidup hanya dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang telah diperiksa. Ia menjadikan warga bukan sekadar konsumen informasi, melainkan penafsir yang bertanggung jawab. Dan dalam dunia yang penuh klaim, mungkin itulah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling berharga.

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Pustaka (APA 7)** pada topik *Critical Thinking, Hoaks, dan Validasi Informasi*. Istilah-istilah ini merujuk pada kerangka yang umum dipakai oleh UNESCO, WHO, OECD, APA, Digital Inquiry Group, IFCN, dan sumber resmi Indonesia. ([UNESCO](#))

Glosarium

Berpikir kritis (critical thinking)

Kemampuan untuk menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, dan menilai

informasi secara rasional sebelum menarik kesimpulan atau mengambil keputusan. ([UNESCO](#))

Hoaks

Informasi palsu atau menyesatkan yang disebar di ruang publik, terutama melalui media digital, sehingga dapat membentuk persepsi yang keliru. ([UNESCO](#))

Misinformation

Informasi yang salah atau tidak akurat, tetapi dibagikan tanpa niat sengaja untuk menipu. ([OECD](#))

Disinformation

Informasi yang salah, tidak akurat, atau menyesatkan, yang disebar dengan sengaja untuk memanipulasi, mengecoh, atau memengaruhi publik. ([OECD](#))

Infodemic

Kelimpahan informasi, termasuk informasi salah atau menyesatkan, yang menimbulkan kebingungan dan mempersulit masyarakat menemukan rujukan yang terpercaya. ([World Health Organization](#))

Literasi media dan informasi (media and information literacy / MIL)

Kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi serta media secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. ([UNESCO](#))

Validasi informasi

Proses memeriksa keakuratan, konteks, tanggal, bukti, dan kredibilitas sumber sebelum suatu informasi dipercaya atau dibagikan. ([UNESCO](#))

Kredibilitas sumber

Derajat keterpercayaan suatu sumber berdasarkan reputasi, kompetensi, transparansi, dan konsistensi dalam melakukan koreksi atau verifikasi. ([IFCN Code of Principles](#))

Fact-checking

Pemeriksaan sistematis terhadap suatu klaim menggunakan bukti yang dapat diverifikasi dan metode yang transparan. ([IFCN Code of Principles](#))

Lateral reading

Strategi memeriksa kebenaran informasi dengan keluar dari halaman yang sedang dibaca dan membandingkannya dengan sumber tepercaya lain. ([Civic Online Reasoning](#))

Vertical reading

Cara membaca yang berfokus hanya pada isi satu halaman atau satu sumber tanpa menelusuri verifikasi dari luar. Dalam literasi digital, pendekatan ini sering kurang memadai untuk memeriksa situs yang belum dikenal. ([Civic Online Reasoning](#))

Confirmation bias

Kecenderungan mencari atau menerima bukti yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki, sambil mengabaikan bukti yang bertentangan. ([APA Dictionary](#))

Triangulasi informasi

Praktik membandingkan satu klaim dengan beberapa sumber independen agar penilaian tidak bergantung pada satu kanal saja. ([OECD](#))

Sumber primer

Dokumen, data, atau rekaman asli yang menjadi asal informasi, seperti laporan resmi, hasil penelitian asli, atau dokumen hukum. ([UNESCO](#))

Sumber sekunder

Sumber yang mengulas, merangkum, atau menafsirkan sumber primer, misalnya artikel berita, esai, atau ringkasan populer. ([UNESCO](#))

ClaimReview

Format data terstruktur yang dipakai untuk menandai hasil pemeriksaan fakta sehingga dapat dikenali oleh alat seperti Fact Check Explorer. Google menyatakan dukungan di Search sedang dihentikan, tetapi masih didukung di Fact Check Explorer. ([Google for Developers](#))

Fact Check Explorer / Fact Check Tools

Perangkat Google untuk menelusuri pemeriksaan fakta berdasarkan topik, klaim, atau figur tertentu. ([Google Toolbox](#))

Pencarian balik gambar (reverse image search)

Teknik menelusuri asal atau penggunaan lain sebuah gambar untuk mengecek konteks, waktu, dan kemungkinan manipulasi. ([Google Toolbox](#))

Klarifikasi hoaks

Layanan atau publikasi resmi yang memeriksa dan meluruskan klaim salah; di Indonesia salah satunya tersedia melalui kanal “Klarifikasi Hoaks” milik Komdigi. ([Kementerian Komunikasi dan Digital](#))

Integritas informasi

Keadaan ketika ekosistem informasi mendukung akurasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik, serta tahan terhadap manipulasi informasi. ([OECD](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

American Psychological Association. (2018, April 19). *Confirmation bias*. APA Dictionary of Psychology. ([APA Dictionary](#))

Digital Inquiry Group. (n.d.). *Intro to lateral reading*. Civic Online Reasoning. ([Civic Online Reasoning](#))

Digital Inquiry Group. (n.d.). *Lateral reading resources & practice*. Civic Online Reasoning. ([Civic Online Reasoning](#))

Digital Inquiry Group. (n.d.). *Lateral reading vs. vertical reading*. Civic Online Reasoning. ([Civic Online Reasoning](#))

Encyclopaedia Britannica. (2026, March 6). *Critical thinking*. ([UNESCO](#))

Google. (n.d.). *Fact Check Tools*. ([Google Toolbox](#))

Google. (n.d.). *About Fact Check Tools*. ([Google Toolbox](#))

Google Developers. (n.d.). *Fact check (ClaimReview) structured data.* ([Google for Developers](#))

International Fact-Checking Network. (n.d.). *Code of principles.* Poynter. ([IFCN Code of Principles](#))

International Fact-Checking Network. (n.d.). *About the Code of Principles.* Poynter. ([IFCN Code of Principles](#))

International Fact-Checking Network. (n.d.). *The commitments.* Poynter. ([IFCN Code of Principles](#))

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (n.d.). *Klarifikasi hoaks.* ([Kementerian Komunikasi dan Digital](#))

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (n.d.). *Berita hoaks.* ([Kementerian Komunikasi dan Digital](#))

Monash University. (n.d.). *What is critical thinking?* ([UNESCO](#))

OECD. (2024). *Disinformation and misinformation.* ([OECD](#))

OECD. (2024). *Governance responses to disinformation.* ([OECD](#))

OECD. (2024). *An international effort using behavioural science to tackle the spread of misinformation.* ([OECD](#))

UNESCO. (n.d.). *Media and Information Literacy.* ([UNESCO](#))

UNESCO. (n.d.). *Welcome to the Media and Information Literacy e-Platform.* ([UNESCO](#))

UNESCO. (2025). *Media and information literacy and digital competencies.* ([UNESCO](#))

World Health Organization. (n.d.). *Infodemic.* ([World Health Organization](#))

World Health Organization. (n.d.). *Managing the infodemic.* ([World Health Organization](#))

World Health Organization. (n.d.). *Let's flatten the infodemic curve.* ([World Health Organization](#))

Rudy C Tarumingkeng: Critical Thinking, Hoaks, dan Validasi Informasi

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 17 March 2026.

Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69b919cb-5958-839f-b052-80da1061c60c>